

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAPUA
DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Delvie Sumbung

Hasan Basri Umar

P. N. Patinggi

Antonia Klara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pPersepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua. Untuk mengungkap permasalahan, diadakan penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan dana bantuan keuangan dan penelitian dokumentasi bertempat di Kampung Napua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa angket (kuesioner), melakukan wawancara dan pengolahan data dari laporan-laporan yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan alokasi pengelolaan dana bantuan keuangan pada masyarakat Kampung Napua pada tahun 2016 cukup tinggi dan sangat berpengaruh dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Nilai rata-rata jawaban responden atas variabel dana bantuan pendidikan adalah sebesar 88,32%. Jumlah responden dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan “Dengan adanya bantuan dana pendidikan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anaknya” yaitu sebesar 92,00%. Nilai rata-rata jawaban pernyataan variabel bantuan dana kesehatan sebesar 80,80% yaitu pada pertanyaan Dengan adanya bantuan dana kesehatan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dengan perolehan nilai presentase sebesar 96,00%. Pada bantuan infrastruktur jumlah berkaitan dengan masyarakat yang sangat merasakan adanya manfaat dari bantuan dana infrastruktur dalam menunjang pembangunan kampong adalah 81,84%.

Sehingga pengelolaan dan bantuan keuangan dapat optimal dan berhasil dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infraktruktur pada masyarakat kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

Kata Kunci : Dana Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Infrastuktur

DAFTAR PUSTAKA

- Casmidi, (2004), “Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD)”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan);
- Hartono, Eko Budi (2008), “Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan);
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang;
- Kaho, Yosef Riwu. (1997), Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Gravindo Persada, Jakarta;
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta;
- Manulang. (1991), Dasar - Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Mardiasmo. (2002), Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta;
- Moleong, lexy J, (2000), “Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya;
- Nugroho, Riant, (2003), Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta;
- Peraturan Bupati Jayawijaya Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Jayawijaya Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004), Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta;
- Susilo, Budi (2007), “ Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007 ” Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan);
- The Liang Gie, (1991), Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.